

## ABSTRAK

Partisipasi politik perempuan adalah prasyarat fundamental dalam memajukan kesetaraan gender dan demokrasi. Di negara demokratis seperti Indonesia pun, keterwakilan perempuan di parlemen dapat dikatakan tidak proporsional dengan jumlah penduduk perempuan. Dengan perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak jauh berbeda, perempuan seharusnya mendapatkan proporsi keterwakilan yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik berujung pada kurangnya perhatian terhadap isu-isu gender dalam proses perkembangan negara. Padahal, dapat dikatakan bahwa perempuan adalah tulang punggung perkembangan negara. Di Indonesia, telah banyak perundang-undangan yang mendukung partisipasi perempuan di politik. Dengan perundang-undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia adalah rekan-rekan untuk mengimplementasikan strategi pengembangan negara dengan undang-undang tersebut sebagai landasan hukumnya. Salah satu rekan penting tersebut adalah *United Nations Development Programme* (UNDP). Sebagai salah satu “agen perkembangan” di jaringan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP memiliki kemampuan untuk membantu mendukung ribuan proyek pengembangan di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Program-program UNDP tersebut sekaligus bertujuan untuk mendukung tercapainya *Millenium Development Goals* (MDG), sebagai tujuan pengembangan global PBB. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaruh UNDP dengan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia selama kurun waktu lima tahun (2006 hingga 2010).

**Kata Kunci:** gender, pengarusutamaan gender, perempuan, Indonesia, partisipasi politik, UNDP, MDG, *democratic governance*